

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pendidikan menempati posisi penting dalam proyek pembangunan Orde Baru. Melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun, negara menghubungkan perluasan sekolah, pembentukan keterampilan, dan penanaman nilai kebangsaan dengan kebutuhan ekonomi serta stabilitas politik. Pendidikan karena itu tidak hanya diperlakukan sebagai pelayanan sosial, tetapi juga sebagai sarana membentuk manusia pembangunan yang dapat menjalankan program negara. Posisi tersebut semakin terlihat pada Repelita IV yang berlaku sejak 1984/1985 sampai 1988/1989 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1984 (Pemerintah Republik Indonesia, 1984).

Kedudukan pendidikan dalam Repelita IV merupakan kelanjutan dari perluasan pendidikan yang telah berlangsung sejak Repelita I sampai Repelita III. Pada tahap-tahap sebelumnya, pemerintah memperbanyak unit sekolah, menambah ruang kelas, merehabilitasi bangunan, mengangkat guru, dan secara bertahap mengurangi beban biaya sekolah. Kebijakan tersebut terutama diarahkan pada perluasan akses. Ketika memasuki Repelita IV, persoalan yang dihadapi tidak lagi hanya mengenai jumlah penduduk yang memperoleh sekolah, tetapi juga mutu, relevansi, dan kemampuan pendidikan menghasilkan tenaga tingkat menengah. Dengan demikian, Kurikulum SMKTA 1984 lahir setelah negara membangun dasar kelembagaan pendidikan yang lebih luas, lalu berusaha mengarahkan sebagian keluaran pendidikan tersebut kepada kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996).

Kesinambungan kebijakan tersebut tampak pula pada pelaksanaan Wajib Belajar enam tahun yang mulai memperoleh penekanan kuat pada awal Repelita IV. Perluasan pendidikan dasar memperbesar kelompok penduduk yang berpotensi melanjutkan ke sekolah menengah. Pertumbuhan calon peserta didik ini memberi tekanan kepada pemerintah untuk memperluas sekolah lanjutan umum dan kejuruan. Pendidikan kejuruan kemudian memperoleh fungsi ganda. Di satu sisi, sekolah harus menampung meningkatnya permintaan pendidikan menengah. Di sisi lain, sekolah diharapkan membentuk kemampuan yang dapat digunakan ketika lulusan memasuki pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Pertumbuhan sekolah kejuruan karena itu tidak dapat dipisahkan dari perluasan pendidikan dasar dan perubahan aspirasi keluarga terhadap pendidikan.

Pola pembangunan Orde Baru sering diringkas melalui Trilogi Pembangunan, yaitu stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Dalam bidang pendidikan, ketiga unsur tersebut saling berkaitan, tetapi tidak selalu berjalan seimbang. Standardisasi kurikulum membantu pemerintah membangun keseragaman tujuan dan nilai. Perluasan sekolah mendukung pemerataan akses. Sementara itu, pendidikan kejuruan diarahkan untuk menyediakan keterampilan yang mendukung pertumbuhan. Masalah muncul ketika pemerataan jumlah sekolah tidak segera diikuti pemerataan mutu guru, bengkel, laboratorium, bahan praktik, dan hubungan dengan dunia kerja. Ketegangan antara perluasan, standardisasi, dan mutu menjadi salah satu ciri penting sejarah implementasi Kurikulum SMKTA 1984.

Repelita IV berlangsung dalam keadaan ekonomi yang menuntut dua agenda sekaligus. Pemerintah mempertahankan pembangunan pertanian, terutama setelah pencapaian swasembada beras, sambil memperkuat industri pengolahan, perdagangan, administrasi, dan jasa. Struktur ekonomi belum berubah menjadi industri secara penuh, tetapi perluasan industri besar dan sedang meningkatkan kebutuhan terhadap teknisi, tenaga tata usaha, operator, pengawas, dan pekerja yang mampu menggunakan teknologi produksi. Perubahan itu menempatkan pendidikan menengah kejuruan sebagai bagian penting dari kebijakan sumber daya manusia.

Data Biro Pusat Statistik memperlihatkan perubahan tersebut secara bertahap. Pada harga konstan 1983, kontribusi industri pengolahan meningkat dari 13,33 persen pada 1985 menjadi 13,97 persen pada 1987. Dalam periode yang lebih panjang, tenaga kerja industri besar dan sedang meningkat dari 870.019 orang pada 1979 menjadi 1.691.435 orang pada 1986. Pertumbuhan tersebut tidak berarti bahwa seluruh perekonomian telah menjadi industri. Pada 1986, industri rumah tangga masih menampung 2.714.264 pekerja. Dengan demikian, pembangunan membutuhkan keterampilan yang beragam, mulai dari teknologi industri modern sampai produksi skala kecil dan rumah tangga (Biro Pusat Statistik, 1989, hlm. 306–307 dan 609).

Tekanan terhadap pendidikan juga datang dari pertumbuhan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja meningkat dari 72.245.313 orang pada 1987 menjadi 74.922.636 orang pada 1988. Penduduk yang mencari pekerjaan meningkat lebih cepat daripada jumlah orang yang bekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan kejuruan menghadapi dua tuntutan yang tidak selalu sejalan. Sekolah

harus memperluas kapasitas pendidikan, tetapi pasar kerja tidak secara otomatis menyediakan pekerjaan yang sesuai untuk seluruh lulusan.

Arah pendidikan memperoleh dasar normatif dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983. Pendidikan nasional diarahkan untuk meningkatkan ketakwaan, kecerdasan, keterampilan, budi pekerti, kepribadian, dan semangat kebangsaan agar terbentuk manusia yang mampu membangun dirinya dan bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa tujuan pendidikan Orde Baru memadukan fungsi ekonomi, moral, sosial, dan politik. Pendidikan kejuruan harus menghasilkan keterampilan kerja, tetapi tetap berada dalam kerangka pembentukan warga negara berdasarkan Pancasila (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 1983).

Bahasa kebijakan mengenai manusia pembangunan menunjukkan bahwa negara tidak memisahkan keterampilan dari pembentukan moral dan politik. Lulusan yang diharapkan bukan hanya pekerja yang mampu menjalankan alat atau prosedur, tetapi juga warga negara yang disiplin, memiliki rasa tanggung jawab, dan menerima nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama. Karena itu, Program Inti tetap menempati bagian besar dalam struktur kurikulum. Pendidikan Agama, Pendidikan Moral Pancasila, sejarah, bahasa Indonesia, olahraga, dan koperasi berfungsi menjaga agar orientasi kejuruan tidak sepenuhnya berubah menjadi pelatihan pekerjaan yang sempit.

Pada saat yang sama, penempatan pendidikan dalam proyek pembangunan membuat sekolah dinilai dari kemampuannya mendukung agenda negara. Pendidikan kejuruan memperoleh legitimasi karena dianggap lebih dekat dengan

kebutuhan produksi, administrasi, pelayanan, dan modernisasi pertanian. Posisi tersebut menghasilkan peluang berupa perhatian kebijakan dan perluasan kelembagaan, tetapi juga membatasi cara keberhasilan dinilai. Apabila keberhasilan hanya diukur dari kesiapan kerja, fungsi sosial, kebudayaan, dan pengembangan pribadi dapat terabaikan. Penelitian ini karena itu membaca kurikulum sebagai pertemuan antara tujuan produktif dan tujuan pembentukan manusia, bukan sebagai kebijakan ekonomi semata.

Kurikulum SMKTA 1984 disusun dalam konteks tersebut. Dokumen kurikulum menyebut perlunya penyesuaian pendidikan dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan peserta didik, serta lapangan kerja. Untuk program studi dengan beban 240 kredit, struktur kurikulum terdiri atas 60 persen Program Inti dan 40 persen Program Pilihan Kejuruan. Program Inti memuat dasar umum dan dasar kejuruan, sedangkan Program Pilihan Kejuruan diarahkan pada kemampuan khusus sesuai bidang pekerjaan, kebutuhan daerah, dan kebutuhan pembangunan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984a, hlm. 4–7).

Keterhubungan dengan pekerjaan juga tampak melalui kerja lapangan dan bimbingan karier. Kerja lapangan memberi pengalaman pada situasi kerja nyata, sedangkan bimbingan karier membantu siswa mengenali kemampuan, memahami pekerjaan, dan merencanakan pendidikan lanjutan atau pekerjaan. Kedua unsur tersebut menunjukkan bahwa sekolah kejuruan dirancang sebagai ruang transisi antara pendidikan dan kehidupan kerja, bukan hanya sebagai tempat penyampaian mata pelajaran.

Meskipun demikian, Kurikulum SMKTA 1984 tidak dapat diperlakukan sebagai awal tunggal orientasi praktik. Wawancara dengan Bagiono Djokosumbogo menunjukkan bahwa STM Pembangunan telah merintis hubungan dengan industri, seminar kebutuhan kompetensi, dan pemagangan sebelum 1984. Karena itu, arti penting kurikulum lebih tepat dilihat sebagai usaha memperluas, menata, dan menstandarkan secara nasional pengalaman yang sebelumnya berkembang tidak merata pada sekolah perintis (Wawancara dengan Bagiono Djokosumbogo, 28 Oktober 2025).

Persoalan sejarah muncul dari jarak antara rancangan dan pelaksanaan. Dokumen kurikulum menetapkan standar nasional, tetapi sekolah memiliki fasilitas, guru, hubungan industri, dan kondisi daerah yang berbeda. Sekolah di kawasan industri lebih mudah mengakses tempat kerja lapangan dan peralatan modern. Sekolah di daerah yang jauh dari pusat produksi lebih bergantung pada bengkel internal yang tidak selalu mengikuti perubahan teknologi. Perbedaan ini menyebabkan pengalaman siswa terhadap kurikulum tidak seragam.

Data pendidikan menunjukkan perluasan kapasitas sekaligus perlunya pembacaan kritis. Pada STM, SKKA, dan SMEA, jumlah murid meningkat dari 905.393 orang pada 1986/1987 menjadi 1.089.536 orang pada 1988/1989. Namun, pertumbuhan murid tidak sama dengan keberhasilan penyerapan kerja. Pada 1988 terdapat 3.373.814 orang bekerja dan 400.804 orang mencari pekerjaan dalam kelompok berpendidikan SMKTA. Statistik tersebut tidak membedakan tahun kelulusan, jenis sekolah, atau kurikulum yang pernah diikuti. Data hanya dapat

digunakan untuk menggambarkan posisi pendidikan kejuruan dalam pasar kerja, bukan untuk mengklaim bahwa seluruh pekerja merupakan hasil Kurikulum 1984.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini menempatkan Kurikulum SMKTA 1984 dalam hubungan antara kebijakan negara, perkembangan kelembagaan pendidikan kejuruan, pengalaman pelaksanaan, dan struktur ketenagakerjaan. Penelitian tidak menilai kurikulum hanya dari tujuan normatifnya. Peran kurikulum diuji melalui kesesuaian kebijakan, bentuk kelembagaan, kapasitas pelaksanaan, keterhubungan dengan dunia kerja, serta batas yang muncul dalam praktik.

Kajian tentang pendidikan kejuruan Indonesia telah berkembang melalui beberapa jalur. Jalur pertama menempatkan pendidikan kejuruan dalam sejarah kelembagaan. Supriadi (2002) menelusuri perkembangan pendidikan teknik dan kejuruan dari masa kolonial sampai akhir abad kedua puluh. Karya tersebut penting karena menunjukkan kesinambungan institusi, perubahan nomenklatur sekolah, pembentukan direktorat, serta program pengembangan sekolah teknik. Akan tetapi, pembahasannya mencakup rentang waktu yang panjang sehingga Kurikulum SMKTA 1984 tidak dianalisis secara khusus sebagai kebijakan pada satu periode pembangunan.

Karya Muhammad (2015) juga menyusun sejarah panjang sekolah menengah kejuruan dari masa kolonial sampai periode kontemporer. Buku tersebut membantu menempatkan Pelita IV sebagai salah satu tahap perkembangan pendidikan kejuruan. Perspektif jangka panjangnya memperlihatkan bahwa orientasi sekolah terhadap dunia usaha dan industri tidak lahir secara tiba-tiba pada

1984. Namun, karena bertujuan memberikan gambaran institusional umum, buku itu belum menguji secara rinci hubungan antara dokumen kurikulum, data ketenagakerjaan, dan variasi implementasi pada masa Repelita IV.

Jalur kedua membahas kebijakan pendidikan Orde Baru. Tilaar (1995) menjelaskan perluasan pendidikan, sentralisasi, perubahan kurikulum, dan persoalan implementasi selama lima puluh tahun pembangunan pendidikan. Karya ini penting untuk memahami logika pembangunan yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen modernisasi. Tilaar juga menunjukkan bahwa kebijakan nasional sering berhadapan dengan kesenjangan fasilitas, kemampuan guru, dan kondisi daerah. Namun, fokusnya bukan rekonstruksi khusus Kurikulum SMKTA 1984.

Djojonegoro (1994) membahas kebijakan dan program pendidikan kejuruan dari sudut pembuat kebijakan. Karya tersebut memberi penjelasan mengenai arah pendidikan kejuruan, kebutuhan tenaga kerja, dan perkembangan hubungan pendidikan dengan dunia kerja. Nilainya terletak pada kedekatan penulis dengan proses kebijakan. Pada saat yang sama, posisi tersebut membuat karya itu perlu dibaca bersama sumber lain agar keberhasilan kebijakan tidak hanya dinilai dari sudut pemerintah.

Jalur ketiga mengkaji sejarah kurikulum. Soedijarto dan rekan-rekan (2018) menempatkan Kurikulum 1984 dalam perkembangan lembaga kurikulum nasional dan perubahan pendekatan pembelajaran. Karya ini membantu menjelaskan latar kelembagaan, perumusan tujuan, dan keterampilan proses. Namun, pembahasannya mencakup berbagai jenjang pendidikan. Kekhususan pendidikan kejuruan, kerja

lapangan, bimbingan karier, dan hubungannya dengan struktur jabatan tidak menjadi pusat kajian.

Literatur pendidikan vokasional kontemporer, seperti Sudira (2016), berguna untuk memahami istilah kompetensi, keterampilan kerja, dan hubungan pendidikan dengan pekerjaan. Akan tetapi, konsep kontemporer tidak dapat dipindahkan secara langsung ke dekade 1980-an. Istilah *link and match* dan praktik kerja industri berkembang lebih kuat pada periode berikutnya. Penelitian ini karena itu menggunakan istilah sezaman seperti kerja lapangan, Program Pilihan Kejuruan, keterampilan jabatan, dan bimbingan karier agar tidak menghasilkan anakronisme.

Dari tinjauan tersebut terlihat tiga kekosongan. Pertama, belum banyak penelitian yang menempatkan Kurikulum SMKTA 1984 secara khusus dalam batas waktu Repelita IV. Kedua, hubungan antara rancangan kurikulum dan data ketenagakerjaan sering dibahas secara terpisah. Ketiga, perbedaan antara tujuan kebijakan, proses pelaksanaan, dan hasil belum selalu dibedakan secara tegas.

Penelitian ini mengambil posisi pada persilangan sejarah kebijakan pendidikan dan sejarah sosial-ekonomi. Kebaruannya terletak pada penggunaan periodisasi internal 1983–1989, perbandingan Kurikulum 1976/1977 dengan Kurikulum SMKTA 1984, pemanfaatan seri statistik BPS yang diperbarui, serta kritik silang terhadap dokumen pemerintah dan wawancara pelaku. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menjelaskan apa yang ditetapkan negara, tetapi juga menilai bagaimana kebijakan diterjemahkan, diperluas, dan dibatasi oleh kondisi sejarahnya.

Perbedaan sudut pandang sumber juga menjadi bagian dari persoalan historiografis. Dokumen pemerintah cenderung menampilkan kurikulum sebagai kebijakan yang terencana dan rasional. Literatur kebijakan sering menekankan capaian kelembagaan, sedangkan kesaksian pelaku memperlihatkan proses negosiasi, keterbatasan alat, dan perbedaan kemampuan sekolah. Statistik menyediakan ukuran kuantitatif, tetapi menghilangkan pengalaman individual siswa dan guru. Dengan mempertemukan jenis sumber tersebut, penelitian dapat menghindari dua kecenderungan, yaitu menerima bahasa keberhasilan pemerintah tanpa kritik atau menilai kebijakan hanya dari kekurangannya.

Penelitian ini juga membedakan sejarah kurikulum dari sejarah hasil pendidikan. Sejarah kurikulum dapat direkonstruksi melalui keputusan, pedoman, struktur program, dan proses implementasi. Sebaliknya, sejarah hasil membutuhkan data tentang lulusan, masa tunggu, jenis pekerjaan, dan kesesuaian jurusan. Data nasional pada periode ini belum menyediakan seluruh rincian tersebut. Oleh sebab itu, kontribusi penelitian terletak pada rekonstruksi yang kuat mengenai rancangan dan pelemagaan, disertai penilaian terbatas tetapi empiris terhadap kondisi pendidikan dan ketenagakerjaan.

Keterbatasan data nasional sebagian dapat diperkecil melalui sumber penelusuran tamatan pada tingkat sekolah. Buku Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Indonesia memuat data STM Pembangunan Pertanian Temanggung menurut tahun ajaran, status bekerja, melanjutkan kuliah, berwirausaha, dan belum melapor. Data ini memungkinkan penelitian menilai satu angkatan awal secara lebih konkret, terutama tahun 1987/1988, tetapi tidak boleh digeneralisasikan menjadi

tingkat penyerapan nasional karena hanya berasal dari satu sekolah dan satu bidang keahlian (Supriadi, 2002, hlm. 435).

Penelitian ini menggunakan konsep peran sebagai kategori analitis, bukan sebagai pernyataan kausal. Peran berarti fungsi historis yang dapat dibuktikan melalui hubungan antara sasaran pembangunan, desain kurikulum, pelaksanaan kelembagaan, dan indikator sosial-ekonomi. Suatu kebijakan dinilai berperan apabila terdapat bukti bahwa kebutuhan pembangunan diterjemahkan ke dalam tujuan, struktur program, proses pembelajaran, dan tindakan pelaksanaan.

Peran Kurikulum SMKTA 1984 dianalisis melalui lima dimensi. Pertama, kesesuaian kebijakan, yaitu hubungan antara sasaran GBHN dan Repelita IV dengan tujuan kurikulum. Kedua, penerjemahan kelembagaan, yaitu masuknya kebutuhan pekerjaan ke dalam Program Inti, Program Pilihan Kejuruan, kerja lapangan, bimbingan karier, dan evaluasi keterampilan. Ketiga, kapasitas implementasi, yaitu perkembangan sekolah, murid, guru, fasilitas, dan pelatihan. Keempat, keterhubungan dengan pasar kerja, yaitu posisi penduduk berpendidikan SMKTA dalam angkatan kerja, lapangan usaha, dan jenis pekerjaan. Kelima, keterbatasan, yaitu kesenjangan antara standar nasional dan pelaksanaan di sekolah.

Istilah tujuan pembangunan nasional dalam penelitian ini tidak mencakup seluruh agenda negara. Pembahasan dibatasi pada pengembangan sumber daya manusia, penyediaan tenaga kerja tingkat menengah, peningkatan produktivitas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, diversifikasi kebutuhan sektor ekonomi, serta pembentukan manusia pembangunan. Pembatasan ini diperlukan agar judul tidak menghasilkan klaim yang lebih luas daripada bukti yang tersedia.

Kurikulum dipahami sebagai dokumen kebijakan sekaligus pedoman pelaksanaan. Sebagai dokumen, kurikulum memuat tujuan dan struktur normatif. Sebagai pedoman pelaksanaan, keberhasilannya bergantung pada guru, sarana, sekolah, daerah, dan mitra kerja. Perbedaan ini memungkinkan penelitian menilai jarak antara kurikulum yang direncanakan dan kurikulum yang dijalankan.

Indikator statistik digunakan dengan batas tertentu. Jumlah sekolah, guru, dan murid menunjukkan kapasitas kelembagaan. Jumlah pekerja dan pencari kerja menurut pendidikan menunjukkan posisi kelompok berpendidikan kejuruan dalam pasar kerja. Kedua indikator tersebut tidak mengidentifikasi lulusan angkatan tertentu dan tidak membuktikan bahwa perubahan ekonomi disebabkan oleh kurikulum.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Secara temporal, penelitian dibatasi pada 1984–1989, yaitu masa pelaksanaan Repelita IV. Tahun 1983 dibahas sebagai latar langsung karena GBHN 1983 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1983 menjadi dasar perumusan kurikulum. Tahun 1990 digunakan secara terbatas hanya sebagai tahun penerbitan Statistik Indonesia 1989 yang memuat data akhir periode 1988/1989.

Secara spasial, penelitian berada pada tingkat kebijakan nasional. Pengalaman STM Pembangunan dan keterangan narasumber digunakan sebagai contoh untuk menjelaskan proses serta variasi implementasi, bukan sebagai representasi seluruh sekolah di Indonesia.

Secara tematis, penelitian membahas perumusan, struktur, proses pembelajaran, pelaksanaan, perluasan kelembagaan, hubungan dengan dunia kerja, serta hambatan Kurikulum SMKTA 1984. Penelitian tidak menghitung tingkat penyerapan seluruh lulusan Kurikulum 1984 karena data nasional tidak memisahkan tahun kelulusan dan kurikulum yang diikuti.

Penelitian memasukkan penelusuran tamatan STM Pembangunan Pertanian Temanggung tahun 1987/1988 sebagai studi kasus terbatas. Angkatan tersebut dipilih karena berada pada fase konsolidasi Kurikulum 1984 dan menyediakan data status lulusan yang rinci. Bukti ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penguji mengenai lulusan angkatan awal, tetapi tidak diperlakukan sebagai representasi seluruh STM, seluruh kelompok SMKTA, atau seluruh wilayah Indonesia.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perumusan dan implementasi Kurikulum SMKTA 1984 sepanjang Repelita IV mencerminkan kesinambungan dan perubahan kebijakan pendidikan kejuruan dalam mendukung tujuan pembangunan nasional?
2. Sejauh mana peran tersebut terlihat pada perkembangan kelembagaan pendidikan kejuruan dan posisi tenaga kerja berpendidikan SMKTA, serta hambatan apa yang membatasi pelaksanaannya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Merekonstruksi latar belakang, perumusan, perubahan, dan pelaksanaan Kurikulum SMKTA 1984 sepanjang Repelita IV.
2. Menganalisis peran Kurikulum SMKTA 1984 melalui hubungannya dengan sasaran pembangunan, perkembangan kelembagaan pendidikan kejuruan, posisi tenaga kerja berpendidikan SMKTA, dan hambatan pelaksanaannya.

2. Kegunaan Penelitian

Secara akademis, penelitian ini berguna untuk memperjelas posisi Kurikulum SMKTA 1984 dalam sejarah pendidikan kejuruan Indonesia pada masa Repelita IV. Penelitian ini menunjukkan hubungan antara perumusan kurikulum, arah pembangunan nasional, perluasan kelembagaan pendidikan kejuruan, dan kondisi ketenagakerjaan pada 1984–1989. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi metodologis melalui pembedaan antara tujuan kebijakan, pelaksanaan kurikulum, perkembangan jumlah sekolah dan peserta didik, serta penyerapan tenaga kerja, sehingga perubahan statistik tidak langsung dianggap sebagai akibat tunggal dari kurikulum.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, guru sejarah, dan peneliti pendidikan dalam membahas kebijakan pendidikan Orde Baru berdasarkan dokumen kurikulum, data statistik, dan kesaksian pelaku. Bagi pengelola pendidikan kejuruan, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi persoalan historis yang memengaruhi pelaksanaan kurikulum, terutama ketimpangan fasilitas praktik, keterbatasan guru kejuruan, perbedaan

kapasitas sekolah antardaerah, serta hubungan sekolah dengan dunia usaha dan industri. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi historis agar penyusunan kebijakan pendidikan kejuruan tidak hanya berorientasi pada perluasan jumlah peserta didik, tetapi turut mempertimbangkan kesiapan sarana, kompetensi guru, kebutuhan lapangan kerja, dan mekanisme penelusuran lulusan.

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Historis

Penelitian menggunakan metode historis yang terdiri atas heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap tersebut dilaksanakan secara berulang karena temuan baru dapat mengubah penilaian terhadap sumber dan susunan argumentasi (Herlina, 2020).

Pada tahap heuristik, sumber dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah, statistik nasional, literatur akademik, dan wawancara. Sumber primer utama ialah Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1984, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1983, dokumen Kurikulum SMKTA 1984, pedoman pelaksanaan, Statistik Indonesia 1988 dan 1989, serta wawancara dengan Siswo Wiratno dan Bagiono Djokosumbogo.

Kritik eksternal dilakukan dengan memeriksa lembaga penerbit, tahun, judul, nomor dokumen, dan hubungan sumber dengan peristiwa. Statistik Indonesia 1988 diterbitkan pada 1989, sedangkan Statistik Indonesia 1989 diterbitkan pada 1990. Perbedaan antara tahun data dan tahun terbit dipertahankan agar tidak terjadi kekeliruan kronologi.

Kritik internal dilakukan terhadap isi dan kepentingan sumber. Dokumen kurikulum dan Repelita diperlakukan sebagai pernyataan tujuan negara, bukan laporan netral mengenai keberhasilan. Data BPS dibandingkan antar-edisi. Edisi 1989 memperbaiki angka STM 1987/1988 pada beberapa provinsi. Karena itu, penelitian menggunakan seri yang telah direvisi ketika membahas perkembangan 1986/1987–1988/1989.

Keterangan lisan juga dikritik berdasarkan posisi dan jarak waktu narasumber. Siswo Wiratno terlibat dalam lingkungan pengembangan pendidikan kejuruan, sedangkan Bagiono Djokosumbogo memiliki pengalaman memimpin STM Pembangunan. Keduanya memberi informasi yang tidak selalu tertulis dalam dokumen, tetapi wawancara dilakukan beberapa dasawarsa setelah peristiwa. Keterangan mereka dibandingkan dengan dokumen kurikulum, statistik, dan sejarah kelembagaan.

Interpretasi dilakukan dengan membedakan tujuan, implementasi, indikator, dan keterbatasan. Pertumbuhan jumlah murid tidak langsung ditafsirkan sebagai keberhasilan kurikulum. Peningkatan pekerja berpendidikan kejuruan juga tidak dianggap sebagai hasil tunggal Kurikulum 1984. Fakta tersebut dihubungkan untuk menjelaskan kapasitas dan konteks pelaksanaan.

Historiografi disusun secara kronologis dan analitis. Bab II menelusuri konteks, genealogi, perumusan, dan tahapan implementasi. Bab III membandingkan sasaran kebijakan dengan indikator kelembagaan dan ketenagakerjaan. Susunan ini bertujuan menjelaskan perubahan dan kesinambungan, bukan sekadar merangkum isi dokumen.

Kritik sumber juga diterapkan pada penggunaan istilah. Istilah *link and match* dan praktik kerja industri tidak digunakan sebagai istilah resmi untuk menjelaskan kebijakan 1984. Keduanya dipakai hanya ketika membahas perkembangan konsep pada masa berikutnya. Untuk periode penelitian, istilah yang digunakan adalah kerja lapangan, bimbingan karier, Program Pilihan Kejuruan, dan keterampilan jabatan. Langkah ini penting agar pengalaman dekade 1980-an tidak dijelaskan dengan bahasa kebijakan yang baru populer pada dekade 1990-an.

Data statistik dianalisis melalui perbandingan seri dan perhitungan ulang sederhana. Angka absolut digunakan untuk melihat perluasan kapasitas, sedangkan persentase pertumbuhan dan rasio murid terhadap guru digunakan untuk membaca perubahan beban kelembagaan. Ketika kategori BPS menggunakan istilah SMKTA, istilah tersebut dipertahankan karena merupakan kategori statistik yang lebih luas daripada satu jenis SMKTA. Penelitian tidak mengubah kategori administratif itu menjadi kategori lulusan Kurikulum 1984. Dalam penulisan, fakta disusun menurut hubungan waktu dan masalah. Informasi mengenai program pendidikan ditempatkan setelah pembahasan mengenai kebutuhan pembangunan dan proses perumusan. Data sekolah dan tenaga kerja ditempatkan dalam bab analisis agar tidak digunakan sebagai pembenaran awal terhadap kebijakan. Susunan ini memungkinkan peneliti membedakan apa yang direncanakan, apa yang dijalankan, dan apa yang dapat diamati pada akhir periode.

2. Bahan Sumber

Sumber primer penelitian terdiri atas dokumen kebijakan, statistik nasional, dan wawancara. Dokumen kebijakan digunakan untuk mengkaji tujuan serta

struktur kebijakan pemerintah, sedangkan statistik nasional menggambarkan perkembangan kapasitas sekolah dan kondisi pasar kerja. Wawancara digunakan untuk menjelaskan proses penyusunan kurikulum, kerja lapangan, pelatihan guru, hubungan dengan industri, dan kendala pelaksanaannya.

Buku sejarah pendidikan kejuruan yang disunting Dedi Supriadi digunakan sebagai sumber sekunder sezaman-dekat dan dikritisi melalui perbandingan dengan dokumen kurikulum, statistik BPS, serta wawancara (Supriadi, 2002). Sumber sekunder lainnya digunakan untuk menempatkan hasil penelitian dalam historiografi, bukan untuk menggantikan sumber primer.

E. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak Agustus 2025 hingga Juli 2026. Tahap awal, yang berlangsung pada Agustus–September 2025, meliputi penentuan topik, perumusan masalah, dan penyusunan rancangan penelitian mengenai Kurikulum SMKTA 1984 dalam konteks Repelita IV. Selanjutnya, peneliti menelusuri dokumen kebijakan, dokumen kurikulum, data statistik, dan literatur terkait pada September–Desember 2025, serta melakukan wawancara dengan narasumber pada Oktober 2025. Kritik terhadap sumber tertulis dan lisan dilaksanakan sejak November 2025 hingga Januari 2026 dengan memeriksa asal, waktu penerbitan, keaslian, dan kredibilitas isi sumber.

Hasil kritik sumber kemudian digunakan dalam proses interpretasi dan penyusunan Bab I sampai Bab III pada Januari–Mei 2026. Pada Mei–Juni 2026,

peneliti menyusun kesimpulan, melengkapi daftar pustaka, serta menata data pendukung ke dalam lampiran. Tahap akhir berlangsung pada Juni–Juli 2026 melalui bimbingan, pemeriksaan konsistensi argumentasi, penyesuaian data dan sitasi, serta perbaikan naskah berdasarkan arahan dosen pembimbing dan penguji. Beberapa tahapan berlangsung secara beririsan karena penemuan sumber baru mengharuskan peneliti kembali melakukan penelusuran, kritik, dan interpretasi.



Intelligentia - Dignitas